

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem politik demokrasi yang dalam penerapannya menginginkan kebebasan partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Salah satu perannya yaitu dengan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia melalui sebuah pemilihan umum (Pemilu). Untuk mewujudkan itu, maka pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu sebagai sebuah upaya membangun demokrasi.¹

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), kemudian dimanifestasikan dalam keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.²

¹Petrus Gleko, DKK. 2017. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 6 No.1. hlm.38

²Dwi Haryono. 2018. "Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015". *Jurnal Administrative Reform*, Vol 6, No 2. hlm. 68

Makna inti dari kata golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, dengan berbagai faktor dan alasan. Fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama Tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ke tempat pemungutan suara. Sedangkan di era orde baru, golput lebih diartikan sebagai gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa saat itu.³

Pasca reformasi, misalnya pada tahun 1999 angka golput mencapai 10,4% sementara pada Pemilu tahun 2004 sebesar 23,34%. Selain itu, pada Pemilu tahun 2009 angka golput dalam pemilihan legislatif mencapai 29,01%, dan pada pemilihan presiden mencapai 27,77%. Dari angka tersebut sepanjang era reformasi angka golput telah mampu mengalahkan partai pemenang Pemilu baik dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilihan presiden.⁴

Ada beberapa pendapat tentang meningkatnya fenomena jumlah golput dari masa ke masa. *Pertama* peningkatan jumlah golput terkait dengan ketidakpuasan terhadap partai politik (Parpol). Parpol dianggap hanya berorientasi pada kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat. *Kedua* golput tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat. golput lebih banyak karena persoalan administratif seperti tidak terdaftar, atau jumlah suara yang tidak sah.⁵ golput yang dimaksud disini yaitu : golput ideologis dan administratif. golput

³Bismar Arianto. 2011. "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu". *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1. hlm. 51

⁴Sri yanuarti. 2009. "Golput dan Pemilu di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 6, No. 1. hlm.

25
⁵*Ibid*

ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan politis. golput administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.⁶

Fenomena golput ini tidak hanya terjadi dalam pemilu saja, namun juga terjadi pada tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tahapan demokrasi Bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum Pilkada langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat amandemen undang-undang Tahun 1945. Undang-undang ini, pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi.⁷

Indonesia dengan keragaman bangsa, menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Di beberapa daerah, KPU telah banyak melakukan strategi dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbagai macam upaya dilakukan oleh KPU dengan pendekatan yang berbeda-beda disetiap daerah yang dikenal dengan istilah strategi.

⁶*Ibid*

⁷Rahmad Rinjani. 2014. "Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2*, Nomor 4. hlm. 3470

Tabel 1.1
Perbedaan Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada

No	KPU	Strategi
1.	Kota Samarinda	1. Penguatan Kelembagaan 2. Sosialisasi Politik 3. Pendidikan Pemilih Pemula
2.	Kota Pekanbaru	1. Pengenalan Sasaran 2. Pemilihan Media
3.	Kabupaten Malang	1. Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang 2. Tahap pemilihan tindakan 3. Tahap pengalokasian sumber daya

Sumber: Hasil olahan Peneliti dari Dwi Haryono, Rafika Julia, dan Petrus Gleko dkk

Berdasarkan tabel 1.1 di atas maka dapat disimpulkan dua hal, yakni: *Pertama*, adanya penggunaan strategi oleh KPU di level daerah dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada. *Kedua*, adanya perbedaan strategi yang diterapkan oleh KPU daerah-daerah tersebut dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada.

Fenomena meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pilkada ini, secara khususnya juga terjadi dalam Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Sumatera Barat dengan berkoordinasi bersama 4 Komisi Pemilihan Umum(KPU) kota, yaitu: Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Sawahlunto.

Peningkatan angka partisipasi memilih masyarakat dari Pilkada serentak yang digelar di 4 Kota Sumatera Barat Tahun 2013, dengan Pilkada serentak yang digelar di 4 Kota Sumatera Barat Tahun 2018. Hal ini sebagaimana pernyataan

dari salah seorang Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Nova Indra, yang mengatakan:⁸

“...partisipasi pemilih pada empat Kota yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2018 ini meningkat walau jumlah pasangan calon berkurang pada Pilkada Tahun 2013 lalu. Artinya apa, walau pasangan calon berkurang pada Pilkada tahun ini, partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya atau datang ke TPS tetap tinggi...”

Berdasarkan keterangan dari Nova Indra selaku Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat di atas, diketahui bahwa angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2018 cenderung meningkat dari Pilkada serentak tahun 2013. Kecenderungan ini terlihat dari meskipun jumlah pasangan calon berkurang tetapi masyarakat tetap menyalurkan hak pilihnya. Bahkan, hak pilih yang digunakan dalam artian partisipasi memilih justru semakin meningkat.

Peneliti berasumsi bahwa yang menjadi alasan peningkatan angka partisipasi memilih masyarakat dari pelaksanaan dua Pilkada Serentak tersebut, tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat.

Khusus untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, peningkatan partisipasi pemilih terjadi pada Pilkada tahun 2018. Dimana pada Pilkada tahun 2013 partisipasi pemilih hanya 57,70% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Pilkada 2018 yaitu 64,05%. Artinya perbandingan data partisipasi pemilih dalam dua Pilkada tersebut terdapat selisih peningkatan sebesar 6,35%. angka 6,35% tersebut

⁸Bukittinggi Post. 2019. “Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Padang Panjang”. Diakses dari http://rri.co.id/bukittinggi/post/berita/546434/pemilu_2019/partisipasi_pemilih_pada_pilkada_serentak_padang_panjang_713_perse8n.html Pada tanggal 12 Februari 2018 Pukul 21.30 Wib

merupakan angka yang sangat besar untuk sebuah daerah dengan Daftar Pemilih Tetap di atas 500 ribu pemilih.

Dengan peningkatan tersebut, menarik perhatian peneliti terhadap faktor-faktor apa yang menyebabkan peningkatan partisipasi Pilkada Kota Padang Tahun 2018. Asumsi peneliti berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, bahwa peningkatan ini tidak terlepas dari strategi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 tersebut.

Banyak faktor yang menunjang tingginya angka partisipasi tersebut diantaranya upaya KPU dalam merapikan dan memutakhirkan data DPT, Pendidikan Politik yang diberikan oleh KPU jauh hari sebelum pemilihan.⁹ Dari informasi tersebut, terlihat bahwa peningkatan pemilih pada tahun 2018 tidak dengan sendirinya. Komisi Pemilihan Umum memberikan perhatian khusus berupa strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih tersebut.

Upaya peningkatan partisipasi dilakukan oleh KPU Kota Padang tidak terlepas dari strategi yang dilakukan dengan sasaran pemilih pemula. Seperti yang dikatakan Chandra Eka Putra Komisiner KPU Kota Padang yang kutip dari Media Indonesia¹⁰ :

“.....Untuk saat ini, pihaknya terus menggeber keaktifan masyarakat ikut Pilkada Kota Padang. KPU Kota Padang sudah melakukan beberapa upaya seperti jamboree demokrasi pelajar tingkat Kota Padang, Sosialisasi di Media Sosial dan ke sekolah-sekolah”

Dari informasi di atas memperkuat asumsi peneliti, bahwa peningkatan partisipasi pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang tidak terlepas dari

⁹ Lihat [https://sumbarprov.go.id/Pilkada 2018 Partisipasi Meningkat](https://sumbarprov.go.id/Pilkada%202018/Partisipasi%20Meningkat) di akses pada tanggal 24 November 2021 pukul 21.47 Wib

¹⁰ Lihat [https://m.mediaindeonesia.com/Pemilih Pemula di Pilkada Padang Meningkat 20%](https://m.mediaindeonesia.com/Pemilih%20Pemula%20di%20Pilkada%20Padang%20Meningkat%2020%20diakses%20pada%20tanggal%2024%20November%202021%20pukul%2021.59%20Wib) diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 21.59 Wib

strategi KPU Kota Padang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah seperti yang dibawah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus dari penelitian ini adalah strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Padang pada Pilkada serentak Sumatera Barat tahun 2018, merupakan salah satu daerah yang mempunyai peningkatan partisipasi pemilih paling tinggi meningkatnya dibanding pada periode sebelumnya.

Tabel 1.2
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak di 4 Kota Sumatera Barat

No	Nama Kota	Jumlah DPT		Tingkat Partisipasi		Jumlah Peningkatan
		2013	2018	2013	2018	
1.	Pariaman	41.603	59.414	68,60 %	73,24%	4.64%
2.	Padang	560.723	538.416	57,70 %	64,05%	6.35%
3.	Sawahlunto	42.786	45.233	75,88 %	77,63%	1.75%
4.	Padang Panjang	23.345	36.543	68,70 %	71,41%	2.71%

Sumber: Diolah dari Hasil Rekapitulasi oleh KPU Sumatera Barat Tahun 2013

Alasannya adalah strategi KPU dalam peningkatan partisipasi ini tidak terlepas dari upaya KPU itu sendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan tabel 1.2 tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2018 terlihat dari 4 kota yang melaksanakan Pilkada yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu kota Padang disusul kemudian kota Pariaman. Oleh sebab itu peneliti memfokuskan penelitian

pada strategi peningkatan partisipasi pemilih yang dilakukan KPU kota Padang dalam Pilkada tahun 2018.

Muhammad Sawati mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Padang tahun depan menyentuh 70 persen. Angka jauh di atas realisasi tingkat partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sumbar sebelumnya yang hanya 52 persen. Demi mencapai angka partisipasi 70 persen itulah, Sawati mengatakan, sosialisasi akan difokuskan kepada pemilih pemula baik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan perguruan tinggi. Meski begitu ia mengaku belum bisa menyebutkan berapa total pemilih pemula di Kota Padang. KPU Kota Padang masih mengumpulkan data terkait hal ini.¹¹

Dari keterangan ketua KPU kota Padang yaitu Muhammad Sawati menyatakan bahwa salah satu langkah yang di bidiknya dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih di kota Padang dengan cara memfokuskan kepada pemilih pemula yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat maupun Mahasiswa. KPU Kota Padang tentu memiliki strategi yang berbeda sehingga berdampak perubahan yang bisa dikatakan mengalami kenaikan di periode Pilkada sebelumnya.

Meskipun demikian, keberhasilan KPU Kota Padang yang merupakan Ibu Kota provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan Pilkada bukan tidak mengalami kendala, berdasarkan hasil penelitian Nilam Sapma dan Nora Eka, KPU Kota Padang mengalami kendala dalam segi pendanaan dan respon masyarakat terhadap Pilkada. Akan tetap partisipasi masyarakat Kota Padang

¹¹Lihat [https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada tentang strategi Pilkada Kota Padang Bidik Pemilih Pemula](https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada_tentang_strategi_pilkada_kota_padang_bidik_pemilih_pemula) di akses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 19.00 Wib

meningkat dari pada Pilkada periode sebelumnya. Harusnya, dengan pendanaan dan minimnya respon masyarakat terhadap Pilkada, partisipasi masyarakat rendah karena menurut Adman Nursal, proses pelaksanaan strategi politik memerlukan biaya dan waktu yang cukup.

Namun yang terjadi adalah partisipasi pemilih meningkat dengan kondisi dana yang kurang memadai. Kondisi ini peneliti jadikan masalah penelitian sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk strategi KPU Kota Padang dalam meningkatkan tingkat Partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018.

1.3.1 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya yang dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu politik terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terkait strategi yang tepat diterapkan oleh KPU Kota Padang dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018.